

**ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK,
PERTUMBUHAN EKONOMI, HUTANG
PUBLIK, DAN JUMLAH PENDUDUK
TERHADAP INVESTASI SEKTOR PUBLIK
(Studi Kasus: Tujuh Negara Negara Asia Tenggara)**

Tahun 2010-2016



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Sarja (S1)
Pada Program Sarja Fakultas Ekonomika Dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

AZHAR FATHONI

NIM. 12020114120015

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

2018

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Azhar Fathoni

Nomor Induk Mahasiswa : 12020114120015

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN
PAJAK, PERTUMBUHAN EKONOMI,
HUTANG PUBLIK, DAN JUMLAH
PENDUDUK TERHADAP INVESTASI
SEKTOR PUBLIK
(Studi Kasus: 7 negara ASEAN tahun 2010-
2016)**

Dosen Pembimbing : Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si.

Semarang, 15 Desember 2018

Dosen Pembimbing,

(Dr. Hadi Sasana. S.E., M.Si.)

NIP. 196901211997021001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Azhar Fathoni
Nomor Induk Mahasiswa : 12020114120015
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN
PAJAK, PERTUMBUHAN EKONOMI,
HUTANG PUBLIK, DAN JUMLAH
PENDUDUK TERHADAP INVESTASI
SEKTOR PUBLIK**
(Studi: 7 negara ASEAN tahun 2010-2016)

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 28 Desember 2018

Tim Penguji

1. Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si. (.....)
2. Prof. Dr. H. Miyasto, SU (.....)
3. Dr. Hastarini Dwi Atmanti, S.E., M.Si. (.....)

Mengatahui ,
Pembantu Dekan 1

(Anis Chariri, SE.,M.Com, Ph.D.,Akt.)
NIP.196708091992031001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Azhar Fathoni, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK, PERTUMBUHAN EKONOMI, HUTANG PUBLIK, dan JUMLAH PENDUDUK TERHADAP INVESTASI SEKTOR PUBLIK (Studi Kasus : tujuh negara ASEAN tahun 2010-2016), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar atau ijasah saya yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 15 Desember 2018

Yang membuat pernyataan,

(Azhar Fathoni)

NIM : 12020114120015

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. ”

(QS. An-Nahl, 96)

“ Yesterday is History. Tomorrow is a Mystery, but today is a gift, that why they call it the present. ”

-Master Oogway-

“ Aku tidak gagal dalam ujian. Aku hanya telah menemukan 100 cara yang salah . ”

-Benjamin Franklin-

Skripsi ini saya persembahkan untuk bapak, ibu, dan kakak-kakak saya. Terima kasih untuk segala doa, semangat, dan dukungannya yang selalu mengiringi saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRACT

In carrying out the community service function, the governments of Southeast Asian countries are faced with the problem of making public investment decisions. Public investment decisions are needed to support the implementation of programs, activities, and functions that are policy priorities. Expenditures for public investment must receive greater attention than routine expenditures, because investment spending has a long-term effect, while routine expenditures have more impact on the short term. Where in some ASEAN countries public sector expenditures can be said to be still small as in Cambodia, Laos, and even Indonesia which has a large population.

This study aims to analyze the effect of tax revenues, economic growth, public debt, and population on public sector investment in seven ASEAN countries. This study uses secondary data from 2010 to 2016 obtained from the World Bank, WHO, UNESCO, and the IMF. The analytical method used is Fix Effect Model (FEM).

The results showed that the tax revenue and public debt variables had a positive and significant effect on public sector investment in the seven ASEAN countries, while the economic growth variable and population did not affect public sector investment in the seven ASEAN countries.

Key Words: public invesment, tax revenue, public debt, economic growth, and population

ABSTRAK

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah negara negara Asia Tenggara dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, kerana pengeluaran investasi memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak pada jangka pendek. Dimana di sebagian negara ASEAN pengeluaran sektor publik dapat dikatakan masih kecil seperti pada Cambodja, Laos, dan bahkan Indonesia yang memiliki jumlah penduduk cukup besar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak, pertumbuhan ekonomi, hutang publik, dan jumlah penduduk terhadap investasi sektor publik ditujuh negara ASEAN. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari tahun 2010 sampai 2016 yang diperoleh dari World Bank, WHO, UNESCO, dan IMF. Metode analisis yang digunakan adalah Fix Effect Model (FEM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak, dan hutang publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi sektor publik ditujuh negara ASEAN, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap investasi sektor publik ditujuh negara ASEAN.

Kata Kunci: investasi publik, penerimaan pajak, pertumbuhan ekonomi, hutang publik, dan jumlah penduduk

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK.....	vvi
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Investasi Sektor Publik	12
2.1.2 Teori Pertumbuhan Sektor Publik	13
2.1.3 Teori Barang Publik.....	15
2.1.4 Barang Publik.....	16
2.1.5 Pajak	18
2.1.6 Produk Domestik Bruto	20
2.1.7 Utang Publik.....	22
2.1.8 Teori Mobilitas Penduduk.....	24
2.1.9 Hubungan Antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen.....	25
2.1.9.1 Hubungan Penerimaan Pajak dengan Investasi Sektor Publik	25
2.1.9.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Investasi Sektor Publik.....	26
2.1.9.3 Hubungan Hutang Publik dengan Investasi Sektor Publik	26

2.1.9.3	Hubungan Jumlah Penduduk dengan Investasi Sektor Publik.....	27
2.2	Penelitian Terdahulu	28
2.3	Kerangka Pemikiran.....	30
2.4	Hipotesis Penelitian	31
BAB III	METODE PENELITIAN	33
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional variabel	33
3.1.1	Variabel Penelitian	33
3.1.2	Definisi Operasional	33
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	35
3.2.1	Data Sekunder.....	35
3.3	Metode Pengumpulan Data	35
3.4	Metode Analisis	35
3.4.1	Analisis Data Panel	36
3.5	Tahap Estimasi dan Analisis	38
3.5.1	Uji Chow	38
3.5.3	Uji Hauman	38
3.5.3	Uji Statitik t	39
3.5.4	Uji Statistik F.....	40
3.5.5	Uji Koefisien Determinasi (R-square)	40
3.6	Uji Asumsi Klasik.....	41
3.6.1	Uji Normalitas	41
3.6.2	Uji Autokorelasi.....	41
3.6.3	Uji Multikolinieritas.....	42
3.6.4	Uji Heteroskidastisitas	43
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	44
4.1.1	Gambaran Umum.....	44
4.1.1.1	Keadaan Geografis ASEAN	44
4.1.1.2	Kependudukan.....	45
4.1.2	Kondisi Perekonomian.....	45
4.1.2.1	Pertumbuhan Ekonomi ASEAN.....	46
4.1.2.2	Investasi Sektor Publik ASEAN	47
4.1.2.3	Hutang Publik ASEAN.....	47

4.2	Analisis Data	48
4.2.1	Estimasi model regresi.....	49
4.2.2	Chow Test	50
4.2.3	Hausman Test	50
4.2.4	Uji Asumsi Klasik	50
4.2.1.1	Uji Normalitas.....	51
4.2.1.2	Uji Multikolinieritas	51
4.2.1.3	Uji Autokorelasi.....	52
4.2.1.4	Uji Heterokedastisitas	53
4.2.5	Uji Statistik	54
4.2.5.1	Uji Koefisien Determinasi (Uji R-square).....	54
4.2.5.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	54
4.2.5.3	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	54
4.3	Interpretasi Hasil.....	55
4.3.1	Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Investasi Sektor Publik	56
4.3.2	Pengaruh Hutang Publik terhadap Investasi Sektor Publik	56
BAB V PENUTUP.....		57
5.1	Kesimpulan.....	58
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	58
5.3	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		60
LAMPIRAN		63

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Investasi Sektor Publik Negara Negara ASEAN	2
Tabel 1.2 GDP Riil Negara Negara ASEAN.....	5
Tabel 1.3 Rasio Tax Revenue terhadap GDP pada Negara Negara ASEAN	6
Tabel 1.4 Perbandingan rating Utang Sektor Publik pada Negara Negara ASEAN	8
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk pada Negara Negara ASEAN	10
Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi pada Negara Negara ASEAN	45
Tabel 4.5 Hasil Regresi Model	49
Tabel 4.6 Chou Test	49
Tabel 4.7 Hausman Test.....	50
Tabel 4.8 Uji Normalitas	51
Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas	52
Tabel 4.10 Uji Autokorelasi	53
Tabel 4.11 Uji Heterskedastisitas.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Data Penelitian	64
Lampiran B Tabel t	66
Lampiran C Tabel f	67
Lampiran D Estimasi Regresi	68
Lampiran E Uji Chow	68
Lampiran F Uji Hausman	68
Lampiran G Uji Normalitas	68
Lampiran H Uji Multikolinieritas	68
Lampiran I Uji Autokolerasi.....	68
Lampiran J Uji Heteroskidastisitas	69

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Pertumbuhan Ekonomi, Hutang Publik, dan Jumlah Penduduk Terhadap Investasi Sektor Publik (Studi Kasus 7 negara ASEAN tahun 2010-2016)” ini dengan baik. Tidak lupa sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, suri tauladan sejati yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Sarjana Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan FEB Universitas Diponegoro yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan di FEB Universitas Diponegoro Semarang.
2. Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Departemen IESP yang telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu di Departemen IESP.
3. Dr. Hadi Sasana, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Evi Yulia Purwanti, SE., M.Si. selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Bapak dan ibu dosen yang telah membagi ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama melakukan perkuliahan di FEB Universitas Diponegoro.

6. Orang tua tercinta, bapak, ibu, dan kakak-kakak saya yang tanpa lelah berjuang untuk membesarkan, merawat dan mencurahkan kasih sayangnya serta tak pernah berhenti berdoa untuk kesuksesan penulis.
7. Seluruh teman-teman IESP 2014 yang telah bersama-sama menempuh pendidikan di FEB Universitas Diponegoro.
8. Anggota dari grup “PES 2016” Indra, Rizky terima kasih atas canda tawa, doa, hinaan, dan semangatnya kepada penulis. Semoga kedepan kita akan menjadi lebih baik lagi.
9. Penghuni Kos Sugiati Agung, Brilian, Luthfi, Yudha, dan lain lain yang selalu menemani hingga larut malam demi bermain game namun selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi.
10. Tim I KKN tahun 2017 Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung, Masaji, Reynaldo, Vinia, Rosingah, dan Tiara terimakasih atas segala pengalaman selama 42 hari dan yang selalu mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya.

Semarang, 15 Desember 2018

Azhar Fathoni
Nim 12020114120015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

ASEAN merupakan organisasi tingkat kawasan yang mewadahi kerja sama negara negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok (Thailand) oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Berdirinya ASEAN di tandai dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok. ASEAN yang bertujuan untuk menciptakan kerjasama antar negara negara anggota dalam hal pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial budaya, serta perdamaian dan stabilitas di kawasan ASEAN (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia).

Dalam lingkup ASEAN bentuk kesepakatan yang ada sekarang bukan lagi bentuk kerja sama ekonomi namun sudah merupakan integrasi ekonomi. Dalam literatur ekonomi dan politik dikenal ada beberapa tahapan integrasi regional. Tahapan integrasi tersebut terdiri dari : Preferential Trading Area (PTA); Free Trade Area (FTA); Custom Union; Common Market; Economic and Monetary Union (Economic Community). Tahapan integrasi ekonomi ini bersifat berjenjang dari yang paling sederhana yaitu Preferential Trade Area (PTA) sampai yang paling komprehensif yaitu Economic and Monetary Union (Economic Community).

Permasalahan yang muncul dari dalam ASEAN sendiri adalah masih adanya ketimpangan pembangunan ekonomi yang sangat besar antar negara negara anggota di ASEAN. Salah satunya adalah ketimpangan dalam penyediaan pelayanan publik ,dimana pengeluaran yang dilakukan dalam sektor publik masih sangat kecil. Berikut adalah data investasi sektor publik negara negara di ASEAN.

Tabel 1.1
Investasi Sektor Publik Negara Negara ASEAN tahun 2010-2016 (Dalam million US dollars)

Negara	Investasi Sekto Publik						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Cambodia	2,93	2,81	2,96	3,42	3,1	3,27	3,38
Indonesia	3,91	3,19	4,61	4,66	4,59	4,88	5,21
Laos	2,41	2,21	2,32	4,03	3,74	4,46	4,85
Malaysia	6,67	7,56	7,64	7,38	7,31	7,08	7,03
Philippines	4,41	4,14	3,67	3,63	3,73	4	3,96
Singapore	4,51	4,47	4,61	4,71	5,11	5,27	5,43
Thailand	6,31	7,81	7,34	6,82	6,42	7,71	7,4

Sumber: WHO, UNESCO, WordBank (2018)

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat investasi sektor publik (kesehatan, pendidikan, infrastruktur) yang dilakukan oleh negara negara ASEAN .Masing masing negara memiliki perbedaan dalam melakukan investasi hal tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang menjadi prioritas oleh negara masing masing. Singapore dan Malaysia yang dianggap sebagai negara yang paling maju dikawasan Asia Tenggara telah melakukan investasi dalam jumlah besar dalam sektor publik.

Perbedaan terlihat sangat jelas negara negara seperti Kamboja, Laos sangat tertinggal dibanding negara negara ASEAN-6 yang rata rata telah melakukan investasi sektor publik dalam angka yang cukup besar. Investasi dalam sektor publik menunjukkan bahwa negara tersebut telah memprioritaskan kesejahteraan dari masyarakatnya terutama dalam pelayanan publik dimana hal tersebut sangat dibutuhkan dalam menjalankan setiap aktivitas masyarakat untuk mendukung perekonomian.

Investasi dalam sektor publik merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan. Adanya pelayanan sektor publik yang memadai akan membantu masyarakat mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Ketika kesejahteraan masyarakat membaik artinya perekonomian dalam suatu negara dalam keadaan stabil sehingga akan menarik investasi investasi asing untuk masuk ke negaranya. Salah satu faktor yang mempengaruhi investasi

adalah kondisi perekonomian negara tersebut. Apabila negara tersebut dalam kondisi perekonomian yang stabil maka akan menjadi pilihan yang rasional bagi investor investor untuk menanamkan modalnya tanpa perhitungan yang panjang.

Investasi diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam suatu modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan juga jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2003). Dalam Halim (2008), suatu kegiatan investasi adalah setiap pengadaan/pembelian aset yang bermanfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan kemudian aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat baik secara ekonomis, sosial, dan atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Dapat diinterpretasikan bahwa setiap belanja modal merupakan investasi, karena secara teoritis dapat dipastikan akan ada manfaatnya. Dengan demikian setiap belanja modal di pemerintah/sector publik harus melalui sebuah proses analisis atas belanja modal tersebut. Salah satu variabel yang mempengaruhi dalam belanja pemerintah adalah Produk Domestik Bruto.

Secara umum Produk Domestik Bruto adalah jumlah produksi berupa barang dan juga jasa yang dihasilkan disuatu daerah tertentu. PDB dapat dijadikan sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi sebuah negara. PDB juga merupakan jumlah total dari hasil yang diperoleh oleh perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa. Menurut Samuelson (2002) dalam Youndhi (2012), Produk Domestik Bruto adalah jumlah total dari output yang dihasilkan pada batas wilayah sebuah negara dalam waktu 1 tahun. PDB berfungsi mengukur nilai dari jasa dan barang yang diproduksi sebuah wilayah negara tanpa membedakan status kewarganegaraan dalam suatu periode negara tertentu. Selain itu agregat Investasi Publik bervariasi disamping Produk Domestik Bruto (PDB) baik dalam jangka pendek dan jangka panjang dalam posisi fiskal.(Turini, 2004)

Penelitian Kappeler dan Valila (2007) hasilnya mengatakan bahwa Produk Domestik Bruto memiliki pengaruh dalam suatu wilayah atau negara untuk melakukan investasi sektor publik baik disektor pendidikan, kesehatan, ataupun pada infrastruktur lainnya. Produk Domestik Bruto memiliki peran yang penting dalam menentukan investasi karena pada dasarnya ketika sebuah wilayah memiliki trend PDB yang baik maka wilayah tersebut dapat dikatakan bahwa perekonomiannya dalam keadaan yang baik dan stabil. Secara rasional maka dalam melakukan keputusan untuk melakukan sebuah investasi sangatlah memungkinkan .

Tabel 1.2
GDP Riil Negara Negara ASEAN tahun 2010-2016 (Dalam US dollars)

Negara	PDB Riil						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Cambodia	785	882	951	1.013	1.093	1.163	1.269
Indonesia	3.113	3.634	3.687	3.620	3.491	3.334	3.670
Laos	1.141	1.381	1.588	1.883	2.017	2.159	2.338
Malaysia	9.071	10.405	10.779	10.882	11.183	9.648	9.508
Philippines	2.129	2.352	2.581	2.760	2.842	2.878	2.950
Singapore	46.596	53.237	54.715	56.389	56.957	54.940	55.243
Thailand	5.075	5.491	5.859	6.168	5.953	5.846	5.979

Sumber : World Bank (2018)

Pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN memiliki perbedaan yang cukup besar antar negaranya. Hal ini masih menunjukkan bahwa negara negara di ASEAN masih memiliki permasalahan ketimpangan yang tinggi antar negara negara didalamnya. Ketimpangan negara-negara di ASEAN juga dapat dilihat dari pelayanan publik yang telah disediakan oleh masing-masing negara baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur lainnya.

Dalam pelayanannya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, pemerintah dinegara ASEAN mulai menerapkan otonomi dimana sistem pemerintah telah

berganti menjadi desentralisasi. Menurut badan otonom PBB, UNDP, desentralisasi merujuk pada restrukturisasi atau reorganisasi wewenang sehingga ada sebuah sistem tanggung jawab bersama antara institusi pemerintah pada tingkat pusat dan daerah menurut prinsip subsidiaritas, sehingga bisa meningkatkan keseluruhan kualitas dan keefektifan sistem pemerintahan, dan juga meningkatkan wewenang dan kapasitas daerah. Dengan desentralisasi, diharapkan mampu memberikan peluang bagi terciptanya pemerintahan yang baik, seperti meningkatkan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan berbagai keputusan politik; membantu kapasitas rakyat yang masih dalam taraf berkembang, dan memperluas tanggung jawab transparansi, dan akuntabilitas. Dalam hal ini desentralisasi fiskal dapat dilihat dengan penerimaan pajak yang diterima oleh negara tersebut. Noor (2012)

Tabel 1.3
Rasio Pajak pada Negara Negara ASEAN tahun 2010-2016 (dalam persen)

Negara	Rasio Pajak						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Cambodia	10,003	10,11	11,09	11,9	14,5	14,1	15,2
Indonesia	10,53	11,15	11,09	11,2	10,8	10,7	10,3
Laos	13,02	13,14	13,6	13,7	13,8	13,5	12,9
Malaysia	13,33	14,79	15,61	15,3	14,8	14,29	13,7
Philippines	12,14	12,38	12,88	13,3	13,6	13,62	13,67
Singapore	12,96	13,28	13,85	13,4	13,8	13,6	14,2
Thailand	14,93	16,36	15,44	16,9	15,6	16,1	15,6

Sumber : World Bank (2018)

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi. Dalam melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik. Pada Tabel 1.3 menunjukkan data terkait penerimaan pajak pada masing masing negara di Asia Tenggara terhadap PDBnya yang dapat juga dijadikan acuan sebagai indikator kebijakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi memiliki

peran dalam hal tersedianya barang publik untuk memenuhi keinginan masyarakat. Secara keseluruhan dampak dari desentralisasi fiskal dalam pelayanan publik masih ambigu. Persaingan dalam menarik pergerakan mobilitas masyarakat seharusnya menghasilkan respon yang tinggi yang dibutuhkan setiap daerah (Tiebout 1956), meskipun mobilitas di negara berkembang masih belum cukup tinggi terhadap efek ini. Contohnya saja pada negara yang sudah maju seperti halnya Amerika Serikat dimana pergerakan masyarakatnya sangat tinggi, hampir setiap penduduk hanya menempati rumah sewa dikarenakan pergerakannya yang tinggi. Ketika terdapat daerah yang memiliki pelayanan publik yang lebih tinggi maka mereka akan memutuskan untuk berpindah ke daerah tersebut sehingga kompetisi dalam melakukan pelayanan publik di sana sangat ketat.

Menurut UNDP, desentralisasi menstimulasi pencarian program dan inovasi kebijakan, karena pertama, desentralisasi merupakan praktik pemerintahan yang inovatif. Kedua, karena melalui implementasinya, pemerintah daerah membutuhkan asumsi baru dan tanggung jawab yang lebih luas agar bisa memberikan pelayanan bagi semua masyarakat. Asumsi tentang tanggung jawab baru melalui desentralisasi sering kali membutuhkan perbaikan perencanaan, penganggaran serta teknik dan praktik manajemen. Selain itu, juga membutuhkan adopsi berbagai alat baru dan juga pengembangan bagi perbaikan sumber daya manusia yang melaksanakan program program desentralisasi (UNDP,1996).

Penelitian yang telah ada menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dan administratif dapat meningkatkan pelayanan publik. Faguet (2004) pada penelitiannya di Bolivia, desentralisasi memberi kekuasaan pada wilayah wilayah yang lebih terpencil dan kurang mampu, yang mana menghasilkan respon yang lebih tinggi yang dibutuhkan daerah dan pergeseran pengeluaran publik dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Beberapa penelitian juga telah menunjukkan outcome daerah terdorong dengan adanya desentralisasi

fiskal. Meskipun pengeluaran di sektor publik meningkat dengan adanya desentralisasi fiskal akan tetapi setiap negara pasti masih memiliki utang.

Menurut Todaro (1998) utang luar negeri merupakan total dari seluruh pinjaman secara resmi dalam bentuk uang tunai maupun bentuk aktiva lainnya. Utang sering kali menjadi permasalahan yang pelik dalam lingkungan nasional, karena telah tertanam dalam benak mayoritas masyarakat sebuah doktrin general yang memberikan sinyal buruk terhadap utang. Pada kenyataannya utang merupakan bagian penting dalam menentukan kebijakan fiskal, dimana juga merupakan bagian dari suatu sistem besar yang disebut pengelolaan ekonomi.

Utang sektor publik memiliki cakupan yang terdiri dari Utang Pemerintah Pusat, Utang Bank Sentral, dan Utang BUMN, yang didalamnya sudah termasuk utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang sektor publik juga timbul akibat adanya pemberian jaminan asuransi, pensiunan, dan skema penjaminan yang sudah ditetapkan. Utang sektor publik padat menjadi salah satu pemicu kerentanan (vulnerability) bagi perekonomian sebuah negara, yang pada gilirannya dapat menciptakan biaya tersendiri bagi perekonomian. Selain itu utang sektor publik juga diwujudkan dalam kaitannya untuk penyediaan informasi bagi kalangan investor dan pelaku pasar keuangan.

Tabel 1.4
Perbandingan rating Utang Sektor Publik terhadap GDP pada Negara Negara ASEAN tahun 2010-2016

Negara	Hutang Publik						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Cambodia	41,84	39,9	37,96	35,4	34,1	33,9	29,1
Indonesia	16,74	19,06	21,394	24,88	24,68	27,7	31,5
Laos	20,35	27,03	33,7	46,3	40,85	48,6	65,6
Malaysia	53,35	53,25	53,16	53	52,66	53,5	52,7
Philippines	53,671	51,87	50,07	49,24	45,39	44,8	42,1
Singapore	95,9	98,5	101,1	104,7	106,7	105,6	112,9
Thailand	43,44	43,61	43,782	42,19	43,34	50,6	41,2

Sumber : CIA World Fact Book (2018)

Negara negara Asia Tenggara yang mana merupakan member dari ASEAN kebanyakan adalah negara berkembang. Utang publik masih menjadi masalah yang dihadapi oleh semua negara-negara ASEAN, termasuk Singapura yang mana memiliki basis pendapatan perkapita yang cukup tinggi, dimana Singapura memiliki utang publik sebesar 105,6% dari GDP. Negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Laos memiliki utang publik sebesar 48% - 53% dari rasio GDP. Indonesia memiliki perbandingan yang lebih rendah dari negara ASEAN yang lain yaitu sebesar 27,7% dari rasio GDP.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004), utang publik adalah satu komponen dari kebijakan fiskal. Utang pemerintah merupakan akumulasi nilai dari apa yang dipinjam pemerintah untuk membiayai defisit masa lalu. Mayoritas utang pemerintah berupa surat berharga dengan suku bunga jangka pendek, seperti tagihan atau obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga negara.

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk pada Negara Negara ASEAN tahun 2010-2016 (dalam Juta)

Countries	Population						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Cambodia	14,37	14,61	14,86	15,09	15,31	15,54	15,78
Indonesia	237,64	241,99	245,43	245,7	248,82	252,16	255,46
Laos	6,04	6,12	6,21	6,3	6,39	6,49	6,59
Malaysia	28,59	29,06	29,51	29,4	29,95	30,26	31
Philippines	92,6	94,18	96,5	98,18	100,4	102,4	104,18
Singapore	5,08	5,18	5,31	5,4	5,47	5,54	5,61
Thailand	67,34	67,64	67,96	68,3	68,66	68,84	68,98

Sumber : ADB (2018)

Selanjutnya adalah kepadatan penduduk, kepadatan penduduk disuatu daerah atau wilayah tidaklah sama apalagi disetiap negara yang jelas memiliki luas wilayah yang berbeda beda. Dalam hal ini keputusan pemerintah dalam memberikan sebuah pelayanan sektor publik terutama dalam penyediaan barang publik sangat dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dalam wilayah tersebut. Investasi yang dilakukan dalam sektor publik dipengaruhi

oleh kepadatan penduduk itu sendiri, contohnya adalah fenomena fenomena yang terjadi negara-negara maju di mana daerah yang memiliki pelayanan sektor publik yang lebih memadai memiliki tingkat populasi yang lebih tinggi.

Dari Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa setiap tahun angka pertumbuhan penduduk akan semakin bertambah sehingga pengeluaran sektor publik akan semakin bertambah. Terutama adalah negara-negara dengan jumlah penduduk yang tinggi seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia.

Investasi publik mendapat sedikit perhatian akademis sebagai variabel agregat. Dalam penelitian ini berusaha untuk mengisi kesenjangan tersebut setidaknya di samping menyajikan analisis empiris tentang apa yang mendorong berbagai tipe investasi publik, dengan fokus khusus pada dampak fiskal federalisme. Studi kasus penelitian ini adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara terutama anggota ASEAN. Pengambilan studi kasus ini didasari dengan adanya ketimpangan dalam melakukan investasi sektor publik yang cukup besar yang ada di kawasan Asia Tenggara.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak pada jangka pendek. Studi kasus yang diambil adalah tujuh negara ASEAN di mana tujuh negara tersebut mewakili anggota ASEAN lama (ASEAN-6) dan baru (ASEAN-4).

Investasi sektor publik harus mendapat perhatian baik di bidang akademik maupun lainnya. Perhatian akademis mengenai faktor penentu dan dampak investasi publik sangat penting. Pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh total penerimaan pajak terhadap investasi sektor publik di negara kawasan ASEAN ?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap investasi sektor publik di negara kawasan ASEAN ?
3. Bagaimana pengaruh utang publik terhadap investasi sektor publik di negara kawasan ASEAN ?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap investasi sektor publik di negara kawasan ASEAN ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk :

1. Menganalisis pengaruh dari total penerimaan pajak terhadap investasi sektor publik dikawasan ASEAN
2. Menganalisis pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap investasi sektor publik dikawasan ASEAN
3. Menganalisis pengaruh dari utang publik terhadap investasi sektor publik dikawasan ASEAN.
4. Menganalisis pengaruh dari pertumbuhan penduduk terhadap investasi sektor publik dikawasan ASEAN.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan praktis adalah sebagai informasi dan masukan kepada negara negara Kawasan ASEAN sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut investasi sektor publik.
2. Kegunaan ilmiah untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu ekonomi pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis, yang didukung dengan penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran teoritis menjelaskan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang apa yang seharusnya, sehingga timbul adanya hipotesis (dugaan awal penelitian).

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi metode penelitian yang meliputi variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, hasil dari analisis data, interpretasi dan pembahasan.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan.